

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gerakan Warga Negara (*Civic Movement*) merupakan suatu gerakan yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab warga negara dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan, kualitas hidup masyarakat dan keadilan untuk semua. Seperti dijelaskan oleh Bollman (2014, hlm. 4-5) dalam artikelnya yang berjudul “*The Regional Civic Movement in California*” bahwa *Civic Movement* dilandasi karena kurangnya kerjasama antara pemerintah, para pengusaha, dan kelompok anggota masyarakat, sehingga hal tersebut sangat mengganggu hubungan serta komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, muncul inisiasi dari kelompok masyarakat serta para pengusaha melalui organisasi sosial masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wilayah agar perekonomian, kualitas hidup serta permasalahan seperti ledakan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, pengangguran, dan hal yang menjadi tantangan di wilayah atau negara tersebut dapat teratasi dengan membuat konsensus bersama untuk membantu pemerintah lokal dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Bollman (2014, hlm. 5) juga mengatakan bahwasannya yang diharapkan dari gerakan warga negara ini adalah “...*By stewardship we mean taking responsibility for the future of the region, based on the principle of sustainability: meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” Adanya kerjasama serta mengambil tanggung jawab untuk merubah masa depan suatu daerah, haruslah berdasar kepada prinsip ketahanan, yang meliputi pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam pemenuhan kebutuhan mereka nantinya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa tanggung jawab serta inisiasi dari generasi saat ini merupakan manifestasi bagi generasi selanjutnya, sehingga perubahan yang dilakukan haruslah berdampak baik bagi masa yang akan datang.

Bila dikaitkan dengan konteks Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat dikatakan bahwa konsep gerakan warga negara tersebut bisa dikategorikan dalam domain sosial kultural sebagai wujud penerapan secara praksis di lingkungan

**Febri Fajar Pratama, 2018**

**PERAN KARANG TARUNA DALAM MEWUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL GENERASI MUDA  
SEBAGAI GERAKAN WARGA NEGARA (CIVIC MOVEMENT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sosial masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan perluasan dari *civics* (Ilmu Kewarganegaraan), yang menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Sedangkan Dimond (dalam Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 32 ) membagi pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti sempit dan luas, dimana dalam artian sempit, Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada aspek teori dan praktik pemerintahan demokrasi, sedangkan secara luas diorientasikan pada *Citizenship Education* yang menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan kemasyarakatan.

Sehingga dalam prakteknya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebatas penyampaian bahan ajar yang meliputi demokrasi politik atau pemerintahan saja, tetapi lebih luas dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang menyentuh aspek kehidupan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya melahirkan gerakan *community civic* dan *civic education movement* yang bertujuan agar Pendidikan Kewarganegaraan lebih fungsional (Wuryan, 2008, hlm. 5-6; Hepburn, 1997, hlm. 136). Dalam mewujudkan gerakan warga negara yang ideal, dibutuhkan peran dari generasi muda, dimana generasi muda diidentikan sebagai generator perubahan yang memiliki peranan sangat krusial dalam terciptanya masyarakat yang maju, sehingga ketika para kaum muda itu memiliki kualitas serta integritas yang baik, maka akan berimbas pada bagaimana suatu bangsa bisa berdikari dan kuat. Namun jika generasi muda yang ada tidak berkualitas dan tidak memiliki integritas yang baik, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial yang menghambat kemajuan bangsa tersebut.

Pemuda sendiri dapat diartikan sebagai penerus cita-cita bangsa, yang mana tonggak kemajuan bangsa ada pada pundak mereka, karena kaum muda adalah penentu masa depan bangsa (Satrias, 2009, hlm. 88). Pemuda, dalam undang-undang digolongkan pada rentang usia 16 sampai 30 tahun (UU. No. 40 tahun 2009), yang pada rentang usia tersebut, manusia memasuki masa usia produktif. Bahkan diperkirakan pada tahun 2020-2039 nanti, Indonesia akan memiliki bonus demografi ketika usia produktif lebih banyak ketimbang usia yang

sudah tidak produktif (Konadi & Zainuddin, 2011, hlm. 18). Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah bonus demografi nanti akan dapat dimanfaatkan dengan baik?

Muncie (2015) dalam publikasinya yang berjudul *Youth & Crime* menjelaskan tentang ancaman yang terjadi bagi kaum muda. Dikutip dari Furlong and Cartmel (dalam John Muncie, 2015) dikatakan bahwa periode masa ‘kanak-kanak’ dan juga “dewasa” merupakan istilah konotasi netral yang secara umum dipandang sebagai masa normatif dalam kehidupan. Sedangkan “pemuda” dan “remaja” biasanya memiliki berbagai permasalahan. Hal yang dimaksud adalah seperti kebebasan yang tak dapat dikendalikan, kekerasan, kurangnya tanggung jawab, ketidaksopanan, pemberontakan, mudah terluka/lemah, lalai, melanggar hak orang lain dan ketidakdewasaan. Bagi anak muda, istilah “kriminal”, “penyimpangan”, dan “pelanggaran” menjadi perhatian khusus dari kebanyakan permasalahan perilaku ketimbang pada orang dewasa.

Windiani & Soetjiningsih (2010) menyoroti bagaimana fase atau periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa sangatlah kompleks dan penuh dengan dinamika, pada masa tersebut terjadi perkembangan dan juga perubahan yang pesat. Sehingga resiko gangguan tingkah laku (*conduct disorder*), kenakalan remaja dan juga kekerasan baik dari segi sebagai pelaku maupun korban, sangatlah tinggi. Pada masa remaja pula, banyak didapati gangguan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku seperti banyaknya remaja yang ditahan karena melakukan tindakan kriminalitas yang digolongkan sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquent*), kemudian tindakan kekerasan yang merupakan suatu fenomena kompleks akibat dari berbagai faktor seperti kemiskinan, rasial, penggunaan obat terlarang dan alkohol, paparan kekerasan pada usia dini (*child abuse*), dan kekerasan yang didapatkan dari media masa. Remaja sebagai pelaku kekerasan sering melakukan tindakan seperti pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan, perkelahian dengan kekerasan, penyerangan antar geng, dan melukai orang lain.

Bahkan dikatakan oleh Syarbini (2014, hlm. 1) bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini bukanlah masalah ekonomi, ataupun

pangan, namun masalah krisis moral atau akhlak yang menyebabkan masalah atau krisis-krisis lain seperti krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut Kesuma dkk. (dalam Syarbini, 2014 hlm. 2) kerusakan moral yang terjadi di kalangan pelajar dan remaja ditandai dengan maraknya seks bebas, penyalahgunaan narkoba, peredaran foto dan video porno, serta tawuran pelajar. Berdasarkan informasi dari BKKBN, 63% remaja Indonesia pernah melakukan seks bebas. Sedangkan remaja korban narkoba di Indonesia ada 1,1 juta orang atau 3,9% dari total jumlah korban. Selain itu, berdasarkan data pusat Pengendalian Gangguan DKI Jakarta, pelajar SD, SMP, dan SMA, yang terlibat tawuran mencapai 0,8% atau sekitar 1.318 siswa dari total 1.645.835 siswa di DKI Jakarta.

Melihat fenomena maraknya kenakalan remaja saat ini, merupakan bukti bahwa usia remaja atau pemuda sangat rentan dengan permasalahan sosial, sehingga tanggung jawab pemuda kepada masyarakat sangatlah besar, mengingat bahwa pemuda merupakan tonggak penerus estafet bangsa yang sangat krusial. Ford dkk. (dalam Mcdonough dkk., 2012, hlm. 3) mengungkapkan bahwa “*Social responsibility refers to attitudes and initiative to respect the rights of others, being a responsible citizen, and avoiding violent and destructive behaviors.*” Tanggung jawab sosial merupakan hal yang berkenaan dengan tindakan atau tingkah laku dan inisiatif untuk menghormati hak orang lain guna membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan menghindari kekerasan serta perilaku yang merusak. Tentunya dalam konteks berbangsa dan bernegara, sikap tanggung jawab ini harus dimiliki oleh semua warga negara, terutama generasi muda untuk menekan apatisisme terhadap lingkungan sekitar dan memupuk rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Dalam proses perwujudan menuju ke arah tersebut, yang didasarkan pada pertimbangan besarnya manfaat yang akan didapat dari meningkatnya jumlah usia produktif dan besarnya jumlah pemuda di masa saat ini dan yang akan datang, maka pemerintah membuat peraturan serta kebijakan terkait pemberdayaan pemuda sebagai mitra pemerintah dalam mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi

ekonomi, sosial serta budaya di lingkungan masyarakat dengan membentuk sebuah organisasi sosial masyarakat yang berbasis kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang disebut dengan Karang Taruna. Berdasarkan konsep, nilai dan perkembangan dari Pendidikan Kewarganegaraan saat ini, dirasa tepat dan sangat relevan jika organisasi sosial berbasis kepemudaan seperti Karang Taruna dan tanggung jawab sosial masuk dalam ranah kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan warga negara (*civic movement*) dalam domain sosial kultural yang menekankan kepada konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat.

Adapun makna istilah Karang Taruna itu sendiri diatur dalam Permensos No. 77 / Huk / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dijelaskan bahwa Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang di definisikan sebagai "...wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial." Berdasarkan fungsi dan tugas pokok Karang Taruna, dijelaskan pada pasal 5 yang berbunyi "Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial."

Bila menilik sepintas pengertian Karang Taruna tersebut, tak diragukan lagi Karang Taruna memiliki peran penting dalam membantu pengentasan masalah sosial, pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat dalam lingkup daerah administrasi desa atau kelurahan. Namun demikian, banyak anggapan bahwa peran Karang Taruna dinilai tidak cukup ampuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena masih banyak pemuda yang enggan ikut bergabung sebagai anggota aktif Karang Taruna, dengan alasan kesibukan ataupun memang karena pemuda yang saat ini sudah terjangkit virus "anti sosial" dan terbuai dengan "budayanya sendiri" sehingga mereka hanya sibuk mementingkan diri sendiri tanpa mau tahu permasalahan yang ada di sekitarnya (Youniss & Yates, 1997).

Penelitian mengenai organisasi sosial berbasis kepemudaan seperti Karang Taruna, tanggung jawab sosial, dan gerakan warga negara (*civic movement*) sebenarnya sudah banyak, hanya saja terbatas pada dimensi pembahasan yang tidak saling terkait. Seperti misalnya penelitian mengenai tanggung jawab sosial dalam organisasi pelayanan publik dan pemerintahan (On & Ilies, 2012; Shaklee, 2001; Rice & Reid, 1956) kemudian peran sekolah dalam membangun tanggung jawab sosial (Yates, 1998; Martinek dkk., 2001). Tanggung jawab sosial dalam konteks pembangunan pemuda (McDonough dkk., 2012). Tanggung jawab sosial dari organisasi pelayanan pemuda (Law, 2011). Pembelajaran tanggung jawab sosial kepada anak muda melalui literasi (Wolk, 2009). Pendidikan pemuda untuk tanggung jawab sosial (Dyck, 2015). Perbandingan tanggung jawab sosial antara pemuda dari negara Amerika dan Israel (Becker, 1976). Serta tanggung jawab warga negara dalam konteks demokrasi (Veil, 2008). Sedangkan untuk pembahasan mengenai gerakan warga negara (*civic movement*) sendiri, relatif banyak jumlahnya, namun penelitian yang dilakukan lebih mengarah kepada gerakan di masing-masing negara (Munoz, 2013; Maga, 1984; Bollman, 2004; Ramamurthy, 2006).

Kemudian untuk peran dari organisasi pemuda, ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan pembangunan siswa di tingkat sekolah menengah dan juga di lingkungan masyarakat (Valeeva & Rybakova, 2011; Wheeler, 2000). Sedangkan di Indonesia sendiri, studi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemuda hanya sedikit saja, karena studi mengenai tanggung jawab sosial ini banyak membahas tentang tanggung jawab sosial korporasi (Hadi, 2011; Suparman, 2013; Yudarwati, 2013). Sedangkan studi mengenai organisasi kepemudaan relatif banyak, namun khusus untuk organisasi Karang Taruna hanya sedikit saja. Peranan pemuda Karang Taruna dalam konteks gotong royong (Pamungkas, 2013), dan model pelatihan kepemimpinan bagi organisasi kepemudaan (Hiryanto dkk. 2015; Parwita & Suryani, 2014; Sanusi & Darmawan, 2016).

Dari beberapa hasil studi yang sudah disebutkan, belum ada kajian mendalam mengenai 3 aspek yang meliputi tanggung jawab sosial, organisasi

sosial kepemudaan dan gerakan warga negara dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut tentunya menjadi landasan kebaruan (*novelity*) penelitian ini, yang membahas secara mendalam mengenai 3 aspek tersebut dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial di masyarakat, khususnya pemuda dalam mewujudkan perilaku tanggung jawab sosial melalui peran organisasi sosial masyarakat berbasis kepemudaan, yaitu Karang Taruna. Sehingga, penelitian ini dirasa penting dalam mengungkap dan menggambarkan secara mendalam mengenai Karang Taruna yang ideal dalam membentuk mental pemuda yang memiliki tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan pada Karang Taruna Nagasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas, Kab. Cianjur yang pada tahun 2016 mendapatkan juara 2 tingkat nasional sebagai Karang Taruna berprestasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini nantinya diharapkan akan menghasilkan *output* berupa gambaran lengkap dan mendalam mengenai peranan Karang Taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial generasi muda, yang kemudian dapat dijadikan sebagai *role model* bagi Karang Taruna lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian, tentunya berangkat dari suatu permasalahan yang kemudian dikaji secara mendalam guna menemukan kebenaran ilmiah, baik secara objektif (kuantitatif) maupun secara subjektif (kualitatif). Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang didasari dari latar belakang permasalahan yang sudah diungkapkan sebelumnya. Dimana permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut : *Pertama*, pemuda sebagai generasi penerus bangsa saat ini dirasa belum mampu mewujudkan peran sentral nya sebagai *agent of change* dan *agent of social control*. Sehingga rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat terabaikan. *Kedua*, banyak anggapan bahwa Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis kepemudaan dirasa belum mampu berperan banyak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemberdaya masyarakat, mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai amanat undang-undang. Selain itu juga, anggota Karang Taruna yang aktif jumlahnya terlampau sedikit dan sering mengalami



fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga terjadi inkonsistensi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program Karang Taruna itu sendiri. Karang Taruna juga dirasa belum bisa menarik minat pemuda untuk turut aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Karang Taruna. *Ketiga*, kurangnya motivasi pemuda untuk mengikuti Karang Taruna, sehingga banyak dari Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, permasalahan umum yang diajukan adalah : Bagaimana Peran Karang Taruna dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda sebagai Gerakan Warga Negara? Khususnya pada Karang Taruna Nagasari Desa Sindanglaya Cianjur. Hal tersebut didasarkan pada beberapa asumsi bahwa, pemuda yang merasa tergerak dan berpartisipasi aktif mengikuti organisasi Karang Taruna akan memiliki kepekaan dan kepedulian yang lebih kepada lingkungan sosialnya; Pemuda yang aktif dan konsisten mengikuti setiap penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna akan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang kuat kepada lingkungan sosialnya.

Agar lebih spesifik dan terarah, fokus masalah tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran dan fungsi Karang Taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial generasi muda?
- 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab Karang Taruna dalam pembentukan lingkungan sosial?
- 3) Mengapa Karang Taruna berkontribusi dalam pembentukan generasi muda yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya?
- 4) Bagaimana antusiasme generasi muda terhadap organisasi sosial kepemudaan Karang taruna?
- 5) Bagaimana peran dan fungsi organisasi Karang Taruna sebagai gerakan warga negara (*civic movement*) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau dari sudut pandang dimensi sosial kultural?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang peran organisasi sosial kemasyarakatan berbasis kepemudaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial generasi muda yang direpresentasikan melalui Karang Taruna Nagasari Desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur yang dikaji dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk dari gerakan warga negara (*civic movement*).

Adapun secara khusus, penelitian bertujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi peran dan fungsi Karang Taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial generasi muda.
- 2) Mendeskripsikan bentuk tanggung jawab Karang Taruna dalam pembentukan lingkungan sosial.
- 3) Mendeskripsikan kontribusi Karang Taruna dalam pembentukan generasi muda yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.
- 4) Mendeskripsikan antusiasme generasi muda terhadap organisasi sosial kepemudaan Karang taruna.
- 5) Menganalisis peran dan fungsi organisasi Karang Taruna sebagai gerakan warga negara (*civic movement*) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau dari sudut pandang dimensi sosial kultural.

### 1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/signifikansi sebagai berikut :

- 1) Manfaat/Signifikansi dari segi Teori
  - a. Secara akademis, *output* dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para peneliti pada bidang kajian ilmu sosial humaniora, khususnya studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural yang saat ini masih jarang dilakukan oleh mahasiswa PKn, guna memberikan tambahan pengetahuan secara luas dan mendalam mengenai isu-isu sosial pemuda dan masyarakat.
  - b. Memberikan deskripsi bahwa organisasi sosial berbasis kepemudaan (Karang Taruna) memiliki peranan yang sangat sentral serta krusial sebagai

wadah kegiatan pemuda dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial yang berlandaskan kepada kepedulian, rasa empati, wujud nilai dan moral, inisiatif serta partisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.

- c. Memberikan pemahaman kepada generasi muda agar dapat memaksimalkan potensi diri melalui kegiatan positif yang berguna bagi lingkungan sekitar melalui Karang Taruna sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan permasalahan sosial.

## 2) Manfaat/Signifikansi dari segi Kebijakan

- a. Menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk lebih giat mempromosikan organisasi Karang Taruna sebagai wadah kegiatan pemuda di setiap daerah.
- b. Dapat dijadikan rujukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial untuk melakukan revitalisasi terhadap organisasi sosial berbasis kepemudaan yakni Karang Taruna di daerah lain yang kurang berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya.

## 3) Manfaat/Signifikansi dari segi Praktik

- a. Diharapkan agar penelitian ini nantinya dapat meng-*influence* generasi muda untuk menjadi anggota Karang Taruna aktif sebagai wujud pengabdian mereka kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).
- b. Diharapkan, para generasi muda dapat memahami, sekaligus menyadari bagaimana pentingnya peran serta mereka dalam masyarakat.
- c. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemuda sebagai warga negara yang bergerak dalam wadah organisasi sosial kepemudaan sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

## 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis yang dikembangkan terdiri dari 5 bab, yakni : Bab 1 adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, paradigma penelitian, tujuan, manfaat serta struktur organisasi tesis. Kemudian bab 2 yakni kajian teori atau tinjauan pustaka yang berkaitan

dengan tema serta latar belakang masalah yang dikembangkan lebih luas berdasarkan teori-teori yang berkenaan dengan organisasi secara umum, organisasi kepemudaan, pemuda, tanggung jawab sosial pemuda, organisasi Karang Taruna, gerakan warga negara yang dikaitkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan beberapa penelitian terdahulu. Bab selanjutnya yaitu tentang metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari setting penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, instrumen dan peran peneliti, penentuan subyek penelitian, dan analisis data induktif.

Selanjutnya adalah bab 4 yakni pembahasan yang dikaji dari hasil observasi lanjutan (hasil temuan) di lapangan baik berupa hasil data wawancara dengan informan maupun melalui kegiatan lain yang dapat mendukung paradigma penelitian secara natural yang dikaitkan dengan teori yang terdapat pada bab sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5, yakni rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar menjadi bahan evaluasi maupun saran bagi pihak terkait.